



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

# bangga  
melayani  
bangsa  
**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

Nomor : 000.7.2.8/0092/300.5

# TAHUN 2024



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN 2024**



## **PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, dapat diselesaikan laporan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam LKjIP ini termuat gambaran hasil capaian kinerja semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja di awal tahun selama kurun waktu satu tahun.

LKjIP ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam mencapai visi dan misinya. Pada akhirnya semoga LKjIP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh jajaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi bagian dari Instansi teknis Pemerintah Kota Samarinda.

Samarinda, 20 Januari 2025

Tim Penyusun

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**MOGHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S,STP**  
NIP. 19840819 200212 1 002



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai amanat bagi organisasi dalam mempertanggungjawabkan atas pelaporan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Pencapaian kinerja dalam penyusunan LKjIP ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah disepakati pada tahun 2024 **telah berhasil dicapai**.

Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian masuk 142,76% pada kategori **Sangat Tinggi**. Pencapaian IKU pada sasaran Meningkatkan Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial dengan indikator kinerja Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan dengan pencapaian sebesar 41,64% dari target 29,17 % meningkat sebesar 18,13% dari Tahun 2023 sebesar 23,51%.

Solusi yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang serta dukungan dana yang cukup untuk keberhasilan program dan kegiatan secara berkesinambungan;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis;
- c. Optimalisasi koordinasi antar instansi terkait;
- d. Memperluas jaringan komunikasi dan informasi masalah-masalah strategi;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

- e. Optimalisasi pemberdayaan terhadap forum-forum (FKUB, FPK dan FKDM).

Semoga LKjIP Badan Kesbangpol Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat menjadikan tolak ukur untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan ditahun yang akan datang.

Samarinda, 20 Januari 2025

Tim Penyusun

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

**MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S.STP**  
NIP. 19840819 200212 1 002





## DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Gambaran Umum .....	
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
2. Struktur Organisasi .....	4
3. Sumber Daya Manusia .....	15
4. Sarana dan Prasarana .....	17
E. Isu Strategis .....	
1. Aspek strategis Organisasi .....	18
2. Permasalahan Utama .....	19
a. Faktor Internal .....	19
b. Faktor Eksternal .....	20
F. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda 2021-2026 .....	24
1. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih .....	24
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	26
3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	27
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 .....	17



C.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 .....	18
D.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	18
E.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
A.	Capaian Kinerja Organisasi .....	36
1.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	37
2.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	38
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rancangan Strategis .....	38
4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/ Internasional .....	39
5.	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja .....	40
6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) .....	43
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) .....	46
B.	Realisasi Anggaran .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>81</b>



## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021-2026 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Selain itu, Laporan Kinerja ini sebagai bentuk perwujudan untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024. Akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang dipergunakan sebagai modal dasar didalam mengemban visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Samarinda;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kota Samarinda adapun Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur baik yang telah dilaksanakan atau sebelumnya kepada kepala Daerah.
2. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa



rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelayanan atau perbaikan penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

## **D. GAMBARAN UMUM**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menyelenggarakan kegiatan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan teknis propinsi

#### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan



kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.

- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

## **2. Struktur Organisasi**

1. Susunan Organisasi OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekertaris
  - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
  - f. Bidang Politik Dalam Negeri
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)

Penjelasan :

- a. Kepala Badan

- b. Sekertaris

membawahi :

- 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
- 2) Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- 3) Jafung Perencana Ahli Muda

- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

membawahi :

- 1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi
- 2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Wawasan Kebangsaan

- d. Bidang Kewaspadaan Nasional

membawahi :

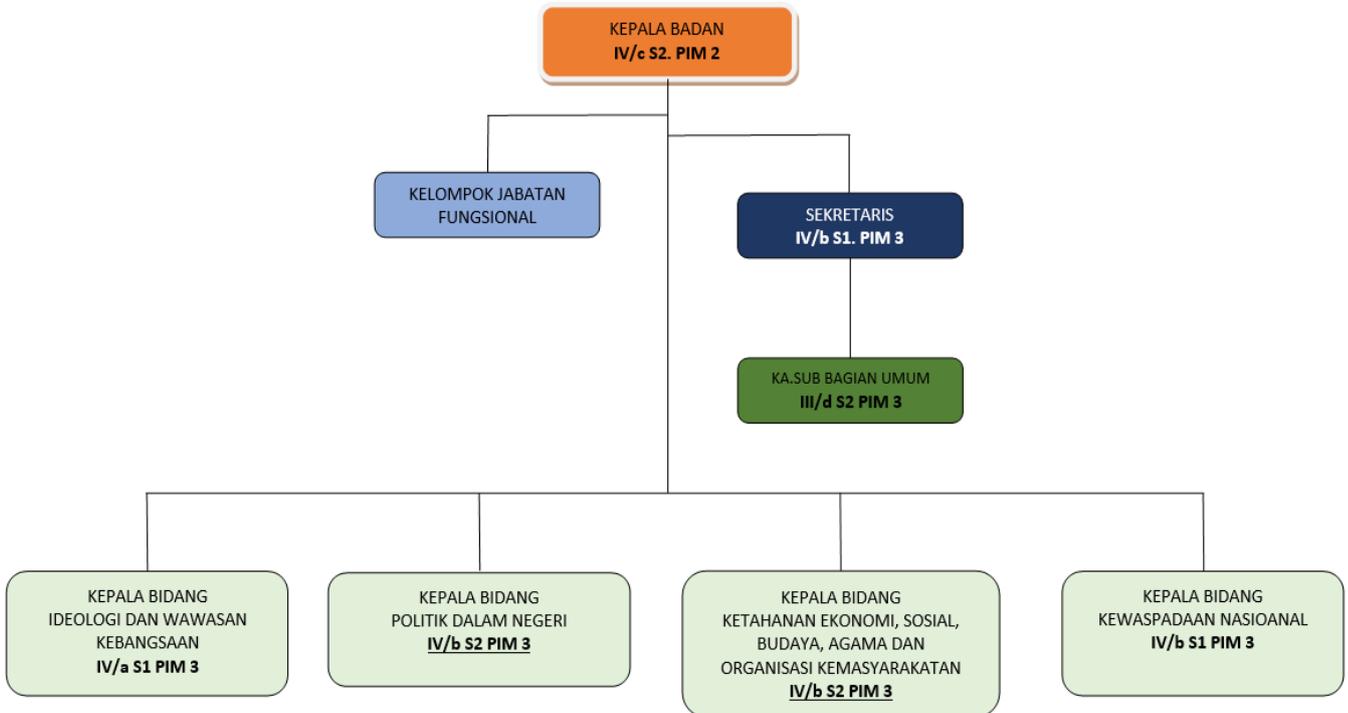


- 1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
  - 2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- membawahi :
- 1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
  - 2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f. Bidang Politik Dalam Negeri
- membawahi :
- 1) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
  - 2) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat digambarkan sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**





Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:

**a. Kepala Badan**

1. Kepala Badan mempunyai tugas yaitu :

Memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan menyelenggarakan kegiatan penetapan kegiatan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi serta politik dalam negeri sesuai norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku searah kebijakan umum daerah.

2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.

b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.

c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.



**b. Sekretaris Badan**

1. Sekretaris Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pelaksanaan program-program kegiatan kedinasan dan kesekretarian serta penginformasian ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Membaca / meneliti / mempelajari seluruh surat masuk dan dokumen lainnya;
  - c. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian dokumen anggaran serta memparaf pertanggungjawaban terhadap sirkulasi dokumen keuangan untuk kelancaran penggunaan dan pengelolaan anggaran keuangan berdasarkan DPA;
  - d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis kesekretarian dan kerumahtanggaan serta teknis bidang-bidang;
  - e. Mengatur penyiapan dan pembinaan kegiatan perencanaan pengumpulan data dan pembuatan statistik kemajuan dalam pemberian pelayanan umum kesekretarian dan kegiatan kedinasan lainnya;
  - f. Mengatur penyiapan dan pembinaan administrasi kepegawaian, kearsipan, pengadministrasian barang-barang inventaris, surat-menyurat serta penatausahaan seluruh perjalanan dinas;
  - g. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretarian dan kerumahtanggaan Badan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas



kedinasan bilamana ada perubahan kebijakan agar diajukan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dan mendapat arahan lebih lanjut;

h. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan kebijakan lebih lanjut serta sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun LKjIP.

3. Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) sub bagian yaitu :

**Subbag Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. Memberi arahan dan pembagian tugas bawahan selaku pengadministrasi agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar berjalan tertib, lancar dan terkendali;
- b. Melaksanakan urusan surat-menyurat pengetikan, penggandaan, kearsipan, dan pemeliharaan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana berkenaan dengan urusan tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa, dan kedudukan hukum pegawai;
- f. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi : bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- g. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan kedinasan serta fasilitasi lainnya;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;



- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Sekretaris sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

**c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa,**

1. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
2. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Badan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi Ketahanan Ideologi Negara, Pelaksanaan Bela Negara, Penghayatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, pembinaan pembaruan dan kewarganegaraan sesuai arahan Kepala Badan yang merujuk pada kebijakan teknis Badan dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah;
  - c. Melaksanakan pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup badan maupun unsur OPD terkait dalam mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan Kepribadian Bangsa, Kewarganegaraan, Kepedulian Sosial dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan secara terpadu dan terkendali agar tetap kondusif sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria



dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diarahkan Kepala Badan selaras dengan kebijakan umum daerah;

- d. Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai nonstruktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai fungsional tertentu maupun fungsional umum selaku administrasi dan/atau selaku petugas operasional umum dan /atau teknis agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kegiatan program dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan program umum Badan;
- e. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Program wasbang serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran masukan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas, bilamana ada perubahan kebijakan agar terlebih dahulu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas - tugas teknis dan non teknis aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Badan;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**d. Kepala Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri,**

1. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
2. Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program strategi bidang Politik terkait Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik serta Kelembagaan Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;
  - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Politik Dalam Negeri;
  - c. Menyusun rencana kerja dan program operasional kerja dalam melaksanakan perhimpunan peraturan yang berkaitan dengan bidang Politik Dalam Negeri;
  - d. Menyiapkan, merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemfasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam Pengimplementasian Kebijakan Publik, Kelembagaan Kemasyarakatan dan Partai Politik, Pendidikan Budaya Politik Dalam Negeri;
  - e. Mengkoordinasikan sinkronisasian dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup Badan maupun dengan unsur OPD terkait dan unsur Instansi Vertikal lainnya dalam upaya mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang Politik Dalam Negeri;
  - f. Mengkoordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atau pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan Menyusun hasil kinerja OPD;
  - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan,**

- 1 Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas dan ormas asing.
- 2 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi



Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;

- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,**

1. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota.
2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
  - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan



- perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
  - e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda tidak mengangkat dan menunjuk Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Sumber Daya Manusia**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2024, memiliki jumlah pegawai sebanyak 70 orang, yang terdiri dari 37 orang PNS, 14 orang PTTB, dan 19 orang PTTH. Untuk mengetahui gambaran umum komposisi aparatur adalah sebagai berikut :



1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	CPNS	PTTB	PTTH	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	-	-	-	-	-	0
2.	SLTP	1	-	-	-	1	1
3.	SLTA	15	-	5	10	33	33
4.	D.I	-	-	-	-	-	0
5.	D.II	-	-	-	-	-	0
6.	D.III	2	-	-	-	2	2
7.	Sarjana ( S1)	15	-	9	9	33	33
8.	Pasca Sarjana (S2)	4	-	-	-	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

2. Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	I	-	-
2.	II	15	15
3.	III	16	16
4.	IV	6	6
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>37</b>

Sumber data : Umum dan Kepegawaian



3. Pegawai Berdasarkan Penempatan dimasing-masing Bidang

No.	Bidang	Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	1 Orang
2.	Sekertariat	Sekretaris	1 Orang
		Subbag	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	22 Orang
3.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	7 Orang
4.	Bidang Politik Dalam Negeri	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	10 Orang
5.	Bidang Ekososbud	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	2 Orang
		Staf	11 Orang
6.	Bidang Kewaspadaan Nasional	Kepala Bidang	1 Orang
		Jafung	1 Orang
		Staf	7 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>70</b>

4. Sarana Dan Prasarana

Guna mendukung kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah pula dilengkapi dengan sarana dan prasarana baik dalam bentuk aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, inventaris serta fasilitas lainnya. Kesemua sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan telah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya.



No	Bidang	Nilai Aktiva (Rp)
1.	Tanah	0,-
2.	Peralatan dan Mesin	10.707.425.480,-
3.	Gedung dan Bangunan	1.780.011.750,-
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,-
5.	Aset Tetap Lainnya	5.000.000,-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-
7.	Aset Lainnya	885.240.000,-
<b>Jumlah Nilai Asset (Per 31 Desember 2024)</b>		<b>12.492.437.230,-</b>

Sumber data : REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Infrastruktur pendukung lainnya yang juga diperlukan berupa sarana dasar seperti listrik, air bersih dan sarana telekomunikasi.

## E. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda isu strategis yang akan di capai mengacu pada isu strategis Renstra 2021-2026 yakni ***“Maraknya paham / ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat akses informasi yang bebas”***

### 1. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kota Samarinda dalam hal penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial, ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni,



budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut berupaya menangani masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta memfasilitasi pembentukan komunitas intelejen di daerah dengan melibatkan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri di daerah.

Terkait dengan tugas lainnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memverifikasi bantuan untuk Partai Politik ataupun Organisasi, memberikan Surat Keterangan Melapor (SKM) bagi organisasi, rekomendasi untuk izin keramaian, rekomendasi pemasangan spanduk dan rekomendasi penelitian.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

## **2. Permasalahan Utama**

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, perlu adanya identifikasi factor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

### **a. Faktor Internal**

#### **1) Kekuatan**

- Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.



- Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- Adanya sarana dan prasarana yang cukup

2) Kelemahan

- Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan OPD
- Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bias dilaksanakan secara maksimal.

**b. Faktor Eksternal**

1) Peluang

- Stabilitas daerah yang cukup kondusif
- Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
- Banyaknya organisasi di masyarakat
- Kerjasama yang baik antar instansi vertikal
- Tersedianya pedoman untuk acuan

2) Ancaman

- Adanya potensi terjadinya konflik
- Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada
- Kenakalan remaja dan Narkoba

Identifikasi isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat juga diklasifikasi dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta



perangkat hukum peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

1) Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>Kinerja SDM yang belum maksimal dikarenakan volume dan beban kerja yang terbatas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kualita SDM.</li><li>Peningkatan kuantitas SDM.</li><li>Penambahan beban kerja dan kegiatan Bidang</li></ul>
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>Anggaran biaya belum maksimal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan efektifitas penggunaan anggaran.</li><li>Penambahan anggaran</li></ul>
Sarana/Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurangnya sarana dan prasarana operasional Badan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kualitas/ kuantitas sarana/prasarana</li></ul>

2) Faktor Eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Faktor	Uraian	Isu
Politik/Organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Luasnya cakupan wilayah dan Kondisi geografis</li><li>Pemberdayaan FKUB, FPK, FKDM, TKDD dan P4GN-PN yang belum maksimal</li><li>Kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan.</li><li>Upaya peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat</li><li>Penguatan kinerja FKUB, FPK, FKDM, TKDD dan P4GN-PN</li></ul>



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menimbulkan tantangan tersendiri bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota. Adapun *permasalahan* yang dihadapi selama tahun 2024, antara lain :

1. Pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga kesulitan memonitor aktifitas masyarakat secara optimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih kurang.
3. Kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial
4. Letak wilayah Samarinda seperti daerah pegunungan dapat menghambat dalam memantau kegiatan masyarakat.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum masih tebang pilih.
6. Pembangunan daerah kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

#### **F. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri 4 (empat) bab yaitu :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2024, isu strategis, aspek strategis, permasalahan utama organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

##### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja Memuat perencanaan strategis 2021-2026 indikator kinerja utama 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

##### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

###### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil



pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**b. Realisasi Anggaran.**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV : Penutup**

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

**Lampiran – Lampiran** : Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.



## **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintah, dalam hal pelaksanaan pembangunannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan sekaligus penyempurnaan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda pada tahun 2024 membuat rencana strategis (Renstra) periode 2021-2026 dilakukan penyempurnaan pada rumusan misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja beserta targetnya. Selanjutnya Renstra revisi tersebut menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran serta pemantauan kinerja.

### **A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA 2021-2026**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4). Maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan sampai kepada pengukuran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyusun Rencana Strategis merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2021-2026 dalam menghadapi berbagai persoalan/tantangan yang akan dihadapi.

#### **1. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

Agar cara pandang jauh kedepan dan apa yang akan dicapai dapat eksis, antisipasi, dan inovatif maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban”***



Dan untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Misi antara lain :

**MISI 1**

- Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya.

**MISI 2**

- Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.

**MISI 3**

- Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.

**MISI 4**

- Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.

**MISI 5**

- Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Di dalam Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melalui program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (sub kegiatan) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dapat menyatukan berbagai perbedaan keyakinan agama dan sedangkan Misi yang diemban terdapat pada Misi 3 (tiga) yaitu : ***“Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”*** terdapat pada Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
2. Terciptanya Pelayanan Prima bagi masyarakat

### **Sasaran Strategis**

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sasaran strategi dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kualitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Utama selama 2021 – 2026 dapat dideskripsikan sebagai berikut:



Tabel : 2.1

Hubungan Visi, Misi Walikota dengan Sasaran dan Tujuan OPD

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2021-2026		“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”
MISI – 3		Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menetapkan strategi dan arah kebijakan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel : 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2021-2026		“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”		
MISI – 3		Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki Wawasan dan Karakter Kebangsaan.	Revolusi Mental

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026



Tabel : 2.3

Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	9,33%	20,83%	25%	29,17%	33,33%	41,67%	30%

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026

### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Renstra dan Target Kinerja  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024

VISI WALIKOTA SAMARINDA 2021-2026		"TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"				
MISI – 3		Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.				
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham kegiatan Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial dibagi yang belum memahami di kalikan 100%	Persen	29,17%

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024



Tabel : 2.5

Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Jumlah yang memahami ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	Orang	0	500 orang	700 orang	1000 orang	1200 Orang	1500 orang

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

**C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2024, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah seperti tabel berikut:

Tabel : 2.6

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Target Kinerja  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	29,17%
		Persentase jumlah Peserta Pendidikan, Pengembangan dan Budaya Politik	100%
		Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	15,85%
		Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	40%
		Persentase penanganan kasus konflik social di Masyarakat	20%

Sumber : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024



**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Walikota Samarinda selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel ; 2.7  
 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	Pelaksanaan Sosialisasi 7 kali kegiatan (Peserta 2125)	177,08%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan	Pelaksanaan Monev. 8 kali	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Jumlah Paskibraka	300 Orang	Seleksi Pembentukan Paskibraka Peserta 404 orang Calon Paskibraka 40 orang	137,36%
		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	44 Orang	0	0%
		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	Bantuan untuk 10 Partai Politik	100%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10000 Orang	Sosialisasi Pendidikan Politik 70 kali Pelaksanaan (Peserta 8459 )	84,59%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Pemantauan, Perkembangan Politik Daerah (TP3D) 45 Orang (1 tim) 12 laporan	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang	Sosialisasi Pemilu untuk Ormas 3 Kali (peserta 750) Rakor Ormas (peserts 120)	145%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 25 kali	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	Sosialisasi P4GN 3 Kali Pelaksanaan (Peserta 750) Sosialisasi FKUB 5 kali (peserta 300)	175%
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 25 Laporan	100%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1000 Orang	Sosialisasi 4 Kali Pelaksanaan (Peserta 823) Rapat Teknis 11 kali (Peserta 335)	115,8%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik 14 kali pelaksanaan	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rapat FORKOPIMDA 12 kali Pelaksanaan (peserta 35)	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Tabel ; 2.8  
 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,718,270,000	APBD 2024
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	79,350,272,387	
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	545,000,000	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1,283,500,000	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	17,388,985,448	
<b>Jumlah</b>		<b>101,286,027,835</b>	

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Pada tahun 2024, terjadi perubahan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Namun, untuk sasaran dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan. Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Tabel ; 2.9  
 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4,098,611,600	APBD 2024
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	78,268,572,387	
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	468,600,000	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1,643,950,000	
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	17,232,882,948	
<b>Jumlah</b>		<b>101,712,616,935</b>	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

**E. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.10  
 Program dan Kegiatan Tahun 2024  
 Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
					Pembentukan Paskibraka
					Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.
2		Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase Pemahaman Terhadap Ideologi, Politik, sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan Konflik sosial	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
4			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024



## **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda.

Suatu kewajiban setiap OPD untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) dimana laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel : 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Katagori	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang



Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja tersebut mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi antara lain :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut adalah :

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori	Sumber Data
Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	29,17%	41,64%	142,76%	Sangat Memuaskan	Badan Kesbangpol Kota Samarinda
<b>Rata-rata capaian sasaran strategis</b>					<b>142,76%</b>	Sangat Memuaskan	

Capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator tujuan/sasaran mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 142,76% pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 94,07%



## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian tujuan dan sasaran organisasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja, capaian kinerja dengan realisasi, capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.3

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2021)	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	97,23%	20,83%	23,51%	41,64%	98,90%	94,07%	142,76%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan realisasi indikator kinerja sebesar 41,64% dari tahun sebelumnya pada indikator kinerja : Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan belum memenuhi target realisasi.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rancangan Strategis

Untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi termasuk di dalamnya realisasi kinerja tujuan untuk mengukur kinerja selama 5 tahun. Pengukuran realisasi kinerja dengan mengacu target jangka menengah sebagaimana dalam Rencanan Strategis Tahun 2021-2026 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.4.

Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja			
			2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	7
	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	100%	97,23%	98,90%	94,07%	142,76%

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/ Internasional

Dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional Lainnya Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan target dan realisasi Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.5

Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian %
1	2	3	4	5	5=4/5*100
Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	142,76%	-	142,76%
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Propinsi Kaltim	82,28%	79,51%	103,48%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tidak dapat



dibandingkan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.**

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sampai dengan tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut:

**Tujuan** *“Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan”* dengan indikator kinerja *“Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan”* capaiannya sebesar 142,76% mengalami **peningkatan** target pada Renstra melalui dukungan pencapaian kinerja sasaran strategis yang dicapai setiap tahunnya.

**Sasaran strategis** yaitu *“Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial”* bisa dikatakan **berhasil** yakni telah tercapai sebesar 41,64% melampaui yang diperjanjikan dengan menetapkan target sasaran sebesar 29,17% dan terealisasi sebesar 142,76%.

Hal ini dikarenakan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Politik Dalam Negeri, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Serta Program Peningkatan Kewaspadaan



Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial berhasil dilaksanakan dengan baik.

Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial di Kota Samarinda pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah melakukan tindakan preventif terhadap peningkatan Pembinaan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya;
3. Adanya koordinasi dengan aparat Kepolisian, Dandim dan Kejaksaan dalam menangani masalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi.
4. Pelaksana kegiatan memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
5. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas yang bagus dalam pelaksanaan program/kegiatan, hingga pelaksanaannya bisa terarah dan relevan antara target dan pagu anggaran yang tersedia.
6. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung yang selaras dengan usaha pencapaian target masing masing kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan capaian kinerja indikator Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan, terdapat beberapa faktor (*kendala/kegagalan*) yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, antara lain:



1. Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. Waktu APBD-Perubahan yang sangat dekat dengan akhir tahun anggaran.
3. Adanya Perubahan Perwali yang membutuhkan waktu untuk perubahan SK yang diterbitkan.
4. Adanya Perubahan pada pihak ke 3 tentang kenaikan harga pengadaan barang.
5. Adanya penetapan jenis target kinerja dan jumlah volume yang kurang tepat, dimana dalam realisasi pelaksanaannya jenis dan volume yang dihasilkan berbeda, sehingga menyebabkan ada ketidaksesuaian antara target dengan realisasi.

Untuk menghadapi hambatan diatas, solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan khususnya pemanfaatan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi antar Bidang.

Meskipun nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Samarinda sudah sesuai dengan target nilai LKjIP, namun tetap berusaha melakukan perbaikan perbaikan dan pencarian solusi. Adapun rencana *tindak lanjut/solusi* yang telah dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada.
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan OPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing.
3. Setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan



rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran ke dalam kegiatan (penyusunan rincian belanja).

Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada OPD, sering terjadi keadaan di OPD dimana target kinerja dan anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada OPD oleh Pemerintah Kota jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau ditargetkan oleh OPD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Dalam hal ini karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun berjalan.

#### **6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Dari keseluruhan pagu anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp. **101.712.616.935,-** (*seratus satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,85% atau sebesar Rp. **98.511.998.464,-** (*sembilan puluh delapan milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*), dengan demikian dapat diketahui bahwa selama periode 2024 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di atas 96,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis, sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2021-2026 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Persentase penyerapan anggaran pada masing-masing program yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut :



Tabel. 3.6  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman meng/enai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	100%	85,41%	14.59%
	Persentase jumlah Peserta Pendidikan, Pengembangan dan Budaya Politik	100%	97,44%	2.56%
	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	100%	56,52%	43.48%
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	92,80%	7.20%
	Persentase penanganan kasus konflik social di Masyarakat	100%	98,39%	1.61%
<b>Jumlah Total Efisiensi</b>				<b>69.44%</b>
<b>Rata-rata efisiensi per indikator</b>				<b>16,13%</b>

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Dari uraian pada table diatas tergambar kondisi pencapaian indikator kinerja sasaran tingkat capaiannya 100% sesuai dengan target dan juga terdapat efisiensi anggaran sebesar 69,44%.

Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut :



Tabel. 3.7  
**ANALISIS EFISISENSI ANGGARAN TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Penggunaan Dana
		Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)	Target Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Capaian (%)	
Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	100%	142,76%	142,76%	4,098,611,600	3,500,575,660	85.41%	598,035,940
	Persentase jumlah Peserta Pendidikan, Pengembangan dan Budaya Politik	100%	85,99%	85,99%	78,268,572,387	76,265,595,167	97.44%	2,002,977,220
	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	100%	143%	143%	468,600,000	264,853,670	56.52%	203,746,330
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	175%	175%	1,643,950,000	1,525,631,255	92.80%	118,318,745
	Persentase penanganan kasus konflik social di Masyarakat	100%	115,8%	115,8%	17,232,882,948	16,955,342,712	98.39%	277,540,236
<b>TOTAL</b>				<b>132,51%</b>	<b>101,712,616,935</b>	<b>98,511,998,464</b>	<b>96.85%</b>	<b>3,200,618,471</b>

Terdapat efisiensi sejumlah Rp 3.200.618.471,- pada pelaksanaan anggaran untuk sasaran berupa “**meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial**”, hal tersebut disebabkan karena adanya Perubahan Perwali tentang SK Tim dan efisiensi waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan, dengan anggaran capaian kinerja tercapai 96,85%.



**7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah membuat program guna mendukung indikator kinerja utama. Rencana program dan indikator kinerja yang disusun pada dokumen Renstra telah dirumuskan agar selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Berikut realisasi kinerja program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024.

**1) Penjelasan program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut:**

- ❖ Indikator Kinerja pada Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja 29,17% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Tabel 3.8

**Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	Persen	23,51%	29,17%	41,64%	142,76%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja **“Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan”** tahun 2024, realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan. Dimana tahun 2024 ditargetkan sebesar 29,17% sedangkan realisasinya sebesar 41,64% dengan capaian kinerja sebesar 142,76%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan**



pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan” antara tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.9

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Realisasi dari Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	100%	97,23%	98,90%	94,07%	142,76%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa **Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan** pada tahun 2024 menunjukkan **keberhasilan**. Pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2024 mengalami **peningkatan** sebesar 142,76% dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 94,07% atau sebesar (72,33%). Dari segi capaian indikator kinerja pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan menunjukkan **keberhasilan**. Capaian indikator kinerja pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan tahun 2023 sebesar 94,07% sementara di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 98,90% atau sebesar (4,83%) dan untuk capaian indikator kinerja tahun 2021 mengalami penurunan capaian sebesar 97,23%. Tingkat keberhasilan melebihi capaian indikator pada Program Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan, hal ini tidak terlepas dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan kepada berbagai unsur masyarakat secara aktif pada tahun 2024.



**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target Renstra 2021-2026**

Indikator kinerja **Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan** adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2024 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.10  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan	30%	41,64%	138,8%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator **Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan** pertahun sampai dengan 2024 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 30% telah terealisasi sebesar 41,64% atau tingkat pencapaian sebesar 138,8%.

- ❖ Indikator Kinerja pada Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**



Tabel 3.11  
**Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	Persen	99,2%	100%	85,99%	85,99%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja **“Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik”** tahun 2024, realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimana tahun 2024 ditargetkan sebesar 100 % sedangkan realisasinya sebesar 85,99% dengan capaian kinerja sebesar 85,99%.

- b. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik” antara tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :**

Tabel : 3.12  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Realisasi dari Tahun 2021 s/d Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	99,83%	99,79%	99,2%	85,99%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa **Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami Pendidikan Politik** pada tahun



2024 menunjukkan *keberhasilan*. Sosialisasi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2024 mengalami *penurunan* sebesar 85,99% dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 99,2% atau sebesar (10,21%). Dari segi capaian indikator sosialisasi Pendidikan Politik Dalam Negeri menunjukkan *keberhasilan*. Capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 99,2% sementara di tahun 2022 meningkat sebesar 99,79% atau sebesar (0,59%). dan untuk capaian indikator kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan capaian sebesar 99,83%. Tingkat keberhasilan sesuai dengan capaian indikator pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, hal ini tidak terlepas dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pendidikan Politik Dalam Negeri kepada seluruh anggota Partai Politik dan masyarakat secara aktif pada tahun 2024.

**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target Renstra 2021-2026**

Indikator kinerja **Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik** adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2024 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini:

Tabel 3.13

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	85,99%	85,99%



Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator **Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik** pertahun sampai dengan 2024 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 100% telah terealisasi sebesar 85,99% dengan tingkat pencapaian sebesar 85,99%.

- ❖ Indikator Kinerja pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dengan capaian kinerja 15,85% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Tabel 3.14  
**Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	Persen	13,274%	15,85%	22,69%	143,2%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja **“Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan”** tahun 2024, realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan. Dimana tahun 2024 ditargetkan sebesar 15,85% sedangkan realisasinya sebesar 22,69% dengan capaian kinerja sebesar 143,2%.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan” antara tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:**



Tabel : 3.15

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran  
Tahun 2024 dengan Realisasi dari Tahun 2022 s/d Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	100%	95,11%	100%	90.73%	143,2%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa **Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan** pada tahun 2024 menunjukkan *keberhasilan*. Pada tahun 2024, sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 143,2% mengalami *peningkatan* dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 90,73% (52,47%). Dari segi capaian indikator kinerjanya, capaian indikator pemahaman mengenai Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan *keberhasilan*. Capaian indikator kinerja pemahaman mengenai sosialisasi UU ke Ormas Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2023 sebesar 90,73% sementara di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 100% (9,27%) dan untuk capaian indikator kinerja tahun 2021 mengalami penurunan capaian sebesar 95,11%. Tingkat keberhasilan melebihi capaian indikator pada Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam upaya peningkatan peran serta ormas dalam Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah melakukan berbagai cara guna pemberdayaan, pengawasan dan peningkatan kualitas dan kapabilitas ormas antara lain melaksanakan Pendidikan politik untuk ormas dan jambore ormas bagi ormas yang aktif dan terdaftar. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yakni banyak ormas yang belum melakukan pendaftaran sehingga mengakibatkan pengawasan terhadap ormas menjadi terkendala.



**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target Renstra 2021-2026**

Indikator kinerja **Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan** adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2024 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.16  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	16,34%	22,69%	138,86%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja **Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan** pertahun sampai dengan 2024 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 16,34% telah terealisasi sebesar 22,69% dengan tingkat pencapaian sebesar 138,86%.

- ❖ Indikator Kinerja pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan capaian kinerja 40% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Tabel 3.17  
**Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya/	Persen	33,087%	40%	69,9%	175%



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja “**Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya**” tahun 2024, realisasinya hampir sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimana tahun 2024 ditargetkan sebesar 40% sedangkan realisasinya sebesar 69,9% dengan capaian kinerja sebesar 175%.

- b. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya” antara tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :**

Tabel : 3.18

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Realisasi dari Tahun 2022 s/d Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	97,65%	94,29%	94,53%	175%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa **Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya** pada tahun 2024 menunjukkan *keberhasilan*. Pada tahun 2024, pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 175% mengalami *peningkatan* dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 94,53% (80,47%). Dari segi capaian indikator kerjanya, capaian indikator mengenai Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya menunjukkan *keberhasilan*. Capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 94,53% sementara di tahun 2022



menurun sebesar 94,29% (0,24%). dan untuk capaian indikator kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan capaian sebesar 97,23%. Tingkat keberhasilan melebihi capaian indikator pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hal ini tidak terlepas dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam melaksanakan sosialisasi secara intens dengan kelompok organisasi seperti F4GN dan FKUB dan unsur masyarakat lain untuk meminimalisir munculnya permasalahan maupun konflik dari berbagai suku.

**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target Renstra 2021-2026**

Indikator kinerja **Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya** adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2024 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :

Tabel 3.19

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya	39%	69,9%	179,23%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja **Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Sosial dan Budaya** pertahun sampai dengan 2024 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 39% telah terealisasi sebesar 69,9% dengan capaian kinerja sebesar 179,23%.



- ❖ Indikator Kinerja pada Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan capaian kinerja 20% dengan realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Tabel 3.20  
**Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
Persentase penanganan kasus konflik sosial di Masyarakat	Persen	3,66%	20%	23,15%	115,75%

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja **“Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat”** tahun 2024, realisasinya mengalami penurunan dengan target telah yang ditetapkan. Dimana tahun 2024 ditargetkan sebesar 20% sedangkan realisasinya sebesar 23,15% dengan capaian kinerja sebesar 115,75%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator “Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat” antara tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:**

Tabel : 3.21  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Realisasi dari Tahun 2022 s/d Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Persentase penanganan kasus konflik sosial di Masyarakat	100%	100%	88,74%	18,30%	115,75%



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa **Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat** pada tahun 2024 menunjukkan **keberhasilan** dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pembinaan Bidang Kewaspadaan Nasional sebesar 115,75% mengalami **peningkatan** yang sangat besar dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 18,30% (97,45%). Dari segi capaian indikator kinerja, capaian indikator mengenai Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat tidak menunjukkan **keberhasilan**. Capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 18,30% sementara di tahun 2022 meningkat sebesar 88,74%. (70,44%). dan untuk capaian indikator kinerja tahun 2021 mengalami penurunan capaian sebesar 97,23%. Kondisi keamanan yang terpelihara akan mampu memberikan dampak langsung pada pembangunan di Kota Samarinda dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Tingkat keberhasilan melebihi capaian indikator pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, hal ini tidak terlepas dari upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini masyarakat untuk antisipasi indikasi munculnya konflik sosial di masyarakat.

**c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target Renstra 2021-2026**

Indikator kinerja **Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat** adalah indikator kinerja yang tidak bersifat kumulatif, sehingga realisasi kinerja sampai tahun 2024 adalah realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2023, yang tidak perlu lagi dijumlahkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022. Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dapat dilihat pada target berikut ini :



Tabel 3.22  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Persentase penanganan kasus konflik sosial di Masyarakat	20%	23,15%	115,75%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian kinerja dari indikator kinerja **Persentase penanganan kasus konflik sosial di masyarakat** pertahun sampai dengan 2024 dibandingkan dengan target renstra dari periode renstra 2021 – 2026 sebesar 20% telah terealisasi sebesar 23,15% dengan capaian kinerja 115,75%.

## 2) Rencana Tindak Lanjut/Upaya Perbaikan

Secara garis besar realisasi kinerja sasaran Badan Kesatuan gsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2024 telah tercapai. Dibandingkan dengan tahun lalu capaian kinerja sasaran ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Namun demikian diharapkan di tahun-tahun berikutnya akan menjadi lebih meningkat lagi.

- a. Persentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan
  - 1) Kegiatan Pembinaan Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka perlu dilaksanakan lebih baik lagi dan lebih profesional dalam hal pendanaan dan perekrutan peserta. Kegiatan ini sangat penting untuk terus diselenggarakan karena bermanfaat untuk mendidik generasi muda agar lebih disiplin, paham akan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.
  - 2) Perlunya penyusunan pengukuran Indeks Ketahanan Ideologi untuk mengetahui kondisi masyarakat Kota Samarinda dalam hal cinta tanah air
- b. Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik :



- 1) Perlunya peningkatan kegiatan penguatan pendidikan politik kepada unsur masyarakat, khususnya generasi muda.
  - 2) Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) partai politik terhadap bantuan keuangan partai politik melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- c.** Persentase jumlah ormas yang di berdayakan
- 1) Perlu lebih ditingkatkan lagi kegiatan pengawasan terhadap seluruh ormas yang berada di Kota Samarinda dengan melakukan pendataan untuk yang masih aktif diupayakan dilakukan sosialisasi agar bisa melakukan pendaftaran Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- d.** Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan :
- 1) Perlu dilakukan upaya kreatif dalam memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kerjasama antar kelompok masyarakat baik antar suku, agama, golongan, dan ras.
  - 2) Persyaratan dan tata cara pendirian tempat ibadah juga menjadi perhatian serius guna menghindari terjadinya konflik, perlu dilakukan sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur.
  - 3) Kegiatan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba
- e.** Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti
- 1) Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini, penanganan konflik dan pendidikan wawasan kebangsaan guna meminimalisir adanya konflik di masyarakat



- 2) Peningkatan kemampuan, analisa dan pelaporan intelijen untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat perlu terus dikembangkan.
- 3) Keterlibatan urusan pemerintahan umum dan stakeholder terkait pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda juga perlu lebih ditingkatkan lagi.

## B. REALISASI ANGGARAN

Secara rinci jumlah anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam penggunaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.23  
 Realisasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik  
 Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan Masyarakat	<b>4.098.611.600</b>	<b>3.500.575.660</b>	<b>598.035.940</b>	<b>85,41%</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>4.098.611.600</b>	<b>3.500.575.660</b>	<b>598.035.940</b>	<b>85,41%</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.405.751.600	1.241.785.401	163.966.199	88,34%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	112.180.000	55.123.200	57.056.800	49,14%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

No.	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	100.680.000	75.460.000	25.220.000	74,95%
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	2.380.000.000	2.128.207.059	251.792.941	89,42%
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	100.000.000	-	100.000.000	0,00%
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	<b>78.268.572.387</b>	<b>76.265.595.167</b>	<b>2.002.977.220</b>	<b>97,44%</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan</b>	<b>78.268.572.387</b>	<b>76.265.595.167</b>	<b>2.002.977.220</b>	<b>97,44%</b>
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	62.811.729.387	62.293.508.954	518.220.433	99,17%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

No.	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.914.843.000	12.725.562.836	1.189.280.164	91,45%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.542.000.000	1.246.523.377	295.476.623	80,84%
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	<b>468.600.000</b>	<b>264.853.670</b>	<b>203.746.330</b>	<b>56,52%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah Ormas yang dibina</b>	<b>468.600.000</b>	<b>264.853.670</b>	<b>203.746.330</b>	<b>56,52%</b>
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	420.000.000	217.661.220	202.338.780	51,82%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

No.	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	48.600.000	47.192.450	1.407.550	97,10%
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	<b>1.643.950.000</b>	<b>1.525.631.255</b>	<b>118.318.745</b>	<b>92,80%</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>1.643.950.000</b>	<b>1.525.631.255</b>	<b>118.318.745</b>	<b>92,80%</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	173.950.000	148.971.900	24.978.100	85,64%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.470.000.000	1.376.659.355	93.340.645	93,65%
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	<b>17.232.882.948</b>	<b>16.955.342.712</b>	<b>277.540.236</b>	<b>98,39%</b>



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

No.	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani</b>	<b>17.232.882.948</b>	<b>16.955.342.712</b>	<b>277.540.236</b>	<b>98,39%</b>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	664.882.500	638.505.534	26.376.966	96,03%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130.230.000	105.369.000	24.861.000	80,91%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16.437.770.448	16.211.468.178	226.302.270	98,62%
<b>Jumlah Alokasi Anggaran</b>			<b>101.712.616.935</b>	<b>98.511.998.464</b>	<b>3.200.618.471</b>	<b>96,85%</b>

**Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

Program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 5 (lima) Program dan 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. **101.712.616.935.-** (*seratus satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,85% atau



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

sebesar Rp. **98.511.998.464,-** (*sembilan puluh delapan milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*), dengan demikian dapat diketahui bahwa selama periode 2024 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di atas 96,85% dengan rincian per program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Indikator kinerja Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat, didukung oleh Program :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kota Samarinda, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 5 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp. **4.098.611.600,-** (empat milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **3.500.575.660,-** (tiga milyar lima ratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) atau **85,41%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2024 terdapat penambahan anggaran, penambahan ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dengan rincian sebagai berikut :

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Awal (Rp.)</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp.)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>				
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2.718.270.000</b>	<b>4.098.611.600</b>	<b>3.500.575.660</b>	<b>85,41%</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	506.090.000	1.405.751.600	1.241.785.401	88,34%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	112.180.000	112.180.000	55.123.200	49,14%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	150.000.000	100.680.000	75.460.000	74,95%
Pembentukan Paskibraka	1.850.000.000	2.380.000.000	2.128.207.059	89,42%
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	100.000.000	100.000.000	-	0%
<b>Total</b>	<b>2.718.270.000</b>	<b>4.098.611.600</b>	<b>3.500.575.660</b>	<b>85,41%</b>

- Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan realisasi indikator kinerja kegiatan jumlah peserta sosialisasi Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebanyak 1000 peserta.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp 3.500.575.660,-)	Rp. 4.098.611.600,-	85,41%
Output	Jumlah peserta sosialisasi Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Jumlah laporan	1000 orang	3569 orang
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	29,17%	41,64%

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 1.405.751.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.241.785.401,- atau 88,34%, serta pada indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebanyak 1200 peserta melebihi dari capaian target kinerja tahun 2024 yakni 2145 peserta.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 1.241.785.401,-	Rp. 1.405.751.600,-	88,34%
Output	Jumlah peserta Sosialisasi dan Dialog serta jumlah peserta Lomba	1200 Orang	Sosialisasi Pelaksanaan 2 kali (Peserta 2125 )
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	177,08%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 112.180.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.123.200,- atau 49,14% serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun sebanyak 8 Laporan memenuhi capaian target kinerja tahun 2024 yakni 8 Laporan.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 55.123.200,-	Rp. 112.180.000,-	49,14%
Output	Jumlah laporan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Peringatan Lahirnya Pancasila	8 Laporan	Monev. 8 kali
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	100%

- c. Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 112.180.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.123.200,- atau 49,14% serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka sebanyak 4 dokumen memenuhi capaian target kinerja tahun 2024 yakni 4 dokumen.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 75.460.000,-	Rp. 100.680.000,-	74,95%
Output	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 dokumen	4 dokumen
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	100%

- d. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 2.380.000.000,- terealisasi sebesar Rp.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

2.128.207.059,- atau 89,42% serta pada indikator kinerja Jumlah Paskibraka sebanyak 444 orang melebihi dari capaian target kinerja tahun 2024 yakni 300 orang.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 2.128.207.059,-	Rp. 2.380.000.000,-	89,42%
Output	Jumlah Paskibraka	300 orang	444 orang
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	148%

e. Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% serta pada indikator kinerja Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila. sebanyak 0 orang kurang dari target kinerja tahun 2024 yakni 44 orang.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 0,-	Rp. 100.000.000,-	0%
Output	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 orang	0 orang
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	0%

❖ Indikator Kinerja Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik, didukung oleh Program :

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp. **78.268.572.387,-** (tujuh puluh delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **76.265.595.167,-** (tujuh puluh enam milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau **97,44%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2024 terdapat Pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.081.700.000,- hal ini



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Kota Samarinda dengan rincian sebagai berikut :

<b>Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Awal (Rp.)</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp.)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>				
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>79.350.272.387</b>	<b>78.268.572.387</b>	<b>76.265.595.167</b>	<b>97,44%</b>
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	63.083.429.387	62.811.729.387	62.293.508.954	99,17%
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14.664.843.000	13.914.843.000	12.725.562.836	91,45%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.602.000.000	1.542.000.000	1.246.523.377	80,84%
<b>Total</b>	<b>79.350.272.387</b>	<b>78.268.572.387</b>	<b>76.265.595.167</b>	<b>97,44%</b>

- Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan pagu anggaran sebesar Rp. **78.268.572.387,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. **76.265.595.167,-** atau 99,2 persen, dengan realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan sebanyak, 10 Parpol, 10000 peserta, dan 12 laporan sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 76.265.595.167	Rp. 78.268.572.387,-	97,44
Output	Jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik dan jumlah berkas verifikasi	10 Parpol, 10000 orang, 12 laporan	10 Parpol, 8459 orang, 12 laporan
Outcome	Persentase jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100%	84,59%

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. **62.811.729.387,-** terealisasi sebesar Rp. **62.293.508.954,-** atau 99,17%, serta pada indikator kinerja Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun sebanyak 10 dokumen memenuhi capaian target kinerja.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 62.293.508.954,-	Rp. 62.811.729.387,-	99,17%
Output	Jumlah Berkas Partai Politik Penerima Bantuan keuangan yang diverifikasi	10 Dokumen	Bantuan untuk 10 Partai Politik
Outcome	Persentase jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100%	100%

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. **13.914.843.000,-** terealisasi sebesar Rp. **12.725.562.836,-** atau 91,45%, serta pada indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, sebanyak 8459 peserta kurang dari capaian target kinerja tahun 2024 yakni 10000 peserta.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 12.725.562.836,-	Rp. 13.914.843.000,-	91,45%
Output	Jumlah peserta Diskusi Politik dan sosialisasi politik	2450 Orang	Sosialisasi Pendidikan Politik 70 Kali Pelaksanaan (Peserta 8459 )
Outcome	Persentase jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100%	84,59%

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. **1.542.000.000,-** terealisasi sebesar Rp. **1.246.523.377,-** atau 80,84%, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 12 laporan memenuhi capaian target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 1.246.523.377,-	Rp. 1.542.000.000,-	80,84%
Output	Jumlah laporan Tim Monitoring Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D)	12 Laporan	Pemantauan, Perkembangan Politik Daerah (TP3D) 45 Orang (1 tim) 12 laporan
Outcome	Persentase jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100%	100%

❖ Indikator Kinerja Persentase jumlah ormas yang di berdayakan, didukung oleh Program :

- 3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp. **468.600.000,-** (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **264.853.670,-** (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau **56,52%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2024 terdapat Pengurangan anggaran sebesar Rp. **76.400.000,-**, hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Kota Samarinda dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>				



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>545.000.000</b>	<b>468.600.000</b>	<b>264.853.670</b>	<b>56,52%</b>
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	420.000.000	420.000.000	217.661.220	51,82%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125.000.000	48.600.000	47.192.450	97,10%
<b>Total</b>	<b>545.000.000</b>	<b>468.600.000</b>	<b>264.853.670</b>	<b>56,52%</b>

- Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. **468.600.000,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. **264.853.670,-** atau 56,52%, dengan realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah Ormas yang dibina sebanyak 24 Ormas, 600 peserta dan 25 laporan melebihi capaian target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 264.853.670	Rp. 468.600.000,-	56,52%
Output	Jumlah pembinaan Ormas dan jumlah laporan	24 Ormas 600 peserta dan 25 laporan	24 Ormas 870 peserta dan 25 laporan
Outcome	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan yang dibina	100%	143,2%

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. **420.000.000,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. **217.661.220,-** atau 51,82%, serta pada indikator kinerja kinerja Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 870 peserta melebihi dari capaian target kinerja tahun 2024 yakni 600 peserta.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 217.661.220,-	Rp. 420.000.000,-	51,82%
Output	Jumlah peserta silaturahmi Paguyuban dan sosialisasi Pemilu untuk Ormas	600 Orang	Sosialisasi Pemilu untuk Ormas 3 Kali (peserta 750) Rakor Ormas (peserts 120)
Outcome	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan yang dibina	100%	145%

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. **48.600.000,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. **47.192.450,-** atau 97,10%, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebanyak 25 laporan memenuhi capaian target kinerja tahun 2024 yakni 25 laporan.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 47.192.450,-	Rp. 48.600.000,-	97,10%
Output	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	25 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 25 Laporan
Outcome	Persentase pemahaman organisasi kemasyarakatan yang dibina	100%	100%

❖ Indikator Kinerja Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan, didukung oleh Program :

- 4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp. **1.643.950.000,-** (satu milyar enam ratus empat



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **1.525.631.255,-** (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau **92,80%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2024 terdapat Penambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sosialisasi dengan kelompok organisasi seperti F4GN dan FKUB sebesar Rp. **360.450.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>				
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>1.283.500.000</b>	<b>1.643.950.000</b>	<b>1.525.631.255</b>	<b>92,80%</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	263.500.000	173.950.000	148.971.900	85,64%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.020.000.000	1.470.000.000	1.376.659.355	93,65%
<b>Total</b>	<b>1.283.500.000</b>	<b>1.643.950.000</b>	<b>1.525.631.255</b>	<b>92,80%</b>

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. **1.643.950.000,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. **1.525.631.255,-** atau 92,80%, serta pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 25 laporan dan 600 peserta.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 1.525.631.255,-	Rp. 1.643.950.000,-	92,80%
Output	Jumlah laporan dan peserta sosialisasi	25 laporan dan 600 peserta sosialisasi	25 laporan dan 1050 peserta sosialisasi
Outcome	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan meningkat	100%	175%

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 173.950.000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 148.971.900,- atau 85,64%, serta pada indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 1050 peserta melebihi dari capaian target kinerja tahun 2024 yakni 600 peserta.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 148.971.900,-	Rp. 173.950.000,-	85,64%
Output	Jumlah peserta sosialisasi	600 Orang	Sosialisasi P4GN 3 Kali Pelaksanaan (Peserta 750) Sosialisasi FKUB 5 kali (peserta 300)
Outcome	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan meningkat	100%	175%

- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 1.470.000.000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.376.659.355,- atau 93,65%, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 25 laporan memenuhi capaian target kinerja tahun 2023 yakni 25 laporan.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 1.376.659.355,-	Rp. 1.470.000.000,-	93,65%
Output	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	25 Laporan	Monitoring dan Evaluasi 25 Laporan
Outcome	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan meningkat	100%	100%

❖ Indikator Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti, didukung oleh Program :

- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang bersumber dari APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp. **17.232.882.948,-** (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **16.955.342.712,-** (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) atau **98,39%** dari pagu Anggaran. Pada Perjanjian Perubahan tahun 2024 terdapat Pengurangan anggaran sebesar Rp. **156.102.500,-** hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dari Pemerintah Kota Samarinda dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>				



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>17.388.985.448</b>	<b>17.232.882.948</b>	<b>16.955.342.712</b>	<b>98,39%</b>
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	644.455.000	664.882.500	638.505.534	96,03%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	106.090.000	130.230.000	105.369.000	80,91%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16.638.440.448	16.437.770.448	16.211.468.178	98,62%
<b>Total</b>	<b>17.388.985.448</b>	<b>17.232.882.948</b>	<b>16.955.342.712</b>	<b>98,39%</b>

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. **12,966,943,500,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. **2,372,426,704,-** atau 18,30 persen, serta pada indikator kinerja kegiatan Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani sebanyak 24 kasus, 1000 peserta sosialisasi dan 14 laporan melebihi dari capaian target kinerja.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 16.955.342.712,-	Rp. 17.232.882.948,-	98,39%
Output	Jumlah kasus, jumlah peserta sosialisasi dan jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	24 kasus, 1000 peserta sosialisasi dan 14 laporan	24 kasus, 1158 peserta sosialisasi dan 11 laporan
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	100%	115,8%



- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 664.882.500,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 638.505.534,- atau 96,03%, serta pada indikator kinerja Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 1158 peserta melebihi dari capaian target kinerja tahun 2024 yakni 1000 peserta

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 638.505.534,-	Rp. 664.882.500,-	96,03%
Output	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah rapat Teknis Penanganan Konflik	1000 Orang	Sosialisasi 4 Kali Pelaksanaan (Peserta 823) Rapat Teknis 11 kali (Peserta 335)
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik social	100%	115,8%

- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 130.230.000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 105.369.000,- atau 80,91%, serta pada indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebanyak 14 laporan memenuhi dari capaian target kinerja tahun 2024 yakni 14 laporan.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 105.369.000,-	Rp. 130.230.000,-	80,91%
Output	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik	14 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik 14 kali
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik social	100%	100%

c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota. Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 16.437.770.448,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 16.211.468.178,- atau 98,62%, serta pada indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 12 dokumen memenuhi dari capaian target kinerja tahun 2024 yakni 12 dokumen.

Uraian	Penggunaan Dana	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan Rp. 16.211.468.178,-	Rp. 16.437.770.448,-	98,62%
Output	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Forkompinda	12 Dokumen	Rapat FORKOPIMDA 12 kali Pelaksanaan (Peserta 35)
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik social	100%	100%



## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN UMUM**

Pada uraian Bab III terdapat bahwa : 1 (satu) indikator sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja program dapat dicapai dengan **BAIK**.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah berupaya memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran yang disajikan melalui hasil dari pengukuran kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 5 (lima) program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan mencapai realisasi anggaran sebesar (85,41%)
2. Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik mencapai realisasi anggaran (97,44%)
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan mencapai realisasi anggaran (56,52%)
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya mencapai realisasi anggaran (92,80%)
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial mencapai realisasi anggaran (98,39%)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda akan melakukan perbaikan dan koordinasi lebih lanjut terhadap capaian indikator yang belum dapat terlaksana. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan atas sistem pengukuran kinerja yang perlu dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi secara intensif antar bidang dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi APBD Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat tercapai.
- c. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan melakukan berbagai sosialisasi atau melalui forum-forum yang sudah dibentuk.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**

Mudah-mudahan perbaikan ditahun berikutnya akan lebih meningkatkan kapasitas kelembagaan baik itu sumber daya manusianya, sarana prasarana dan pendanaan yang cukup. Demikian pula dapat diharapkan meningkatkan capaian yang lebih baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mengucapkan terima kasih pada segenap jajarannya dan pada inspektorat daerah atas koreksi-koreksi ataupun penilaian yang diberikan dalam pembuatan LKjIP ini agar lebih baik, karena LKjIP ini adalah suatu kewajiban setiap OPD sebagai bahan pertanggung jawaban publik yang transparan dan akuntabel disamping sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Meskipun kami menyadari dalam penyusunan LKjIP ini masih ada saja kekurangan, namun demikian kami akan berusaha untuk lebih menyempurnakannya.

Samarinda, 20 Januari 2025

Tim Penyusun

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**MOHAMMAD ARIF SUROCHMAN, S.STP**  
NIP. 19840819 200212 1 002